

DISORIENTASI PENDIDIKAN MADRASAH DI INDONESIA

Hasan Basri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Indonesia

Email: hasanbasri.iainkendari@gmail.com

Abstract

Madrasah in the Middle East has known eight or nine centuries before madrasah in Indonesia, which emerged as a reaction to the reform movement as well as a response to the policy of Dutch colonizers secular education. Madrasah got a decent place in Indonesia after rising SKB 3 minister (Minister of Interior, Minister of Education and Culture, and the Minister of Religious Affairs) in 1975, where madrasah equated with other schools in terms of the status of the diploma, graduates continuing education opportunities and changing schools. In a further development, the school as disoriented. It is caused by two things: first, a paradigm shift towards sekularistik. Education implementation has marred even be interpreted as a partial instead of a holistic paradigm as desired by Islam. Supposedly, the madrasa education as a whole should make Islam as a principle in the determination of educational objectives, the formulation of the curriculum and standard of value of science and the learning process, including determining the qualifications of teachers and school culture that will be developed in the madrasahs. Second, the functional institutional weakness as a result of shifting the orientation and function of the family and their influence and societal demands materialistic-hedonistic. The weakness seen in a mess madrasa curriculum, not optimal role of teachers as well as school culture that is not in line with the will of Islam.

Keywords: *madrasah, Islamic education, secularization*

A. Pendahuluan

Sebelum Indonesia merdeka, pendidikan agama di negeri ini ditekuni oleh para ulama, kiai dan tokoh masyarakat atau gerakan Islam. Setelah merdeka, belum tampak adanya perhatian yang serius dari para pemimpin bangsa di masa awal kemerdekaan dalam mengurus pendidikan agama. Hal ini mungkin dapat dimaklumi karena kesibukan penataan bangsa sebagai negara baru sangat menyita banyak waktu. Karena itu, urusan pendidikan agama lebih banyak ditangani oleh organisasi massa Islam,

terutama yang besar seperti Muhammadiyah dan NU dengan pesantrennya yang banyak tersebar di Pulau Jawa.

Dalam perkembangan selanjutnya, perhatian terhadap pendidikan agama, khususnya madrasah mulai digalakkan dengan memasukkan di bawah Kementerian Agama. Namun, madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya tetap belum mendapatkan perhatian memadai. Barulah tampak keseriusan pemerintah ketika diterbitkannya beberapa peraturan terkait dengan madrasah, di antaranya:

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 1984 tentang penyesuaian program kurikulum pendidikan Madrasah Ibtidaiyah.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 100 Tahun 1984 tentang penyesuaian program kurikulum pendidikan Madrasah Tsanawiyah
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 101 Tahun 1984 tentang program kurikulum pendidikan Madrasah Aliyah
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 1987 tentang penyesuaian struktur program kurikulum pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri.

Meskipun telah ada ketentuan tentang madrasah sebagaimana diatur dalam peraturan di atas, tetapi tetap saja terasa ada pembedaannya dengan pendidikan “umum,” madrasah dan pendidikan agama terasa belum mendapat tempat sewajarnya dalam sistem pendidikan secara nasional.

Semua ketentuan mengenai pendidikan agama kemudian disempurnakan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan keagamaan diakui sebagai bagian dari pendidikan nasional.¹

Perhatian lebih serius lagi terlihat pada dekade terakhir dengan digantinya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU baru ini disebutkan bahwa madrasah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.

Untuk menyempurnakan penyelenggaraan madrasah, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Dalam Peraturan Menteri tersebut diatur mengenai jenjang pendidikan madrasah yang terdiri dari pendidikan usia dini, yakni Raudatul Atfal (RA) yang ditempuh selama 1

¹Tim Redaksi Bumi Aksara, *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Aturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Cet. ke-4, h. 118

atau 2 tahun, pendidikan dasar, yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) ditempuh selama 6 tahun dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) ditempuh selama 3 tahun, dan pendidikan menengah, yakni Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) ditempuh selama 3 tahun.²

Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah tentu dituntut untuk menjalankan tugas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang tidak terlepas dari tujuan hidup menurut Islam. Tujuan hidup manusia menurut Islam adalah untuk mengabdikan kepada Allah SWT. (QS. Al-Zariyat/51: 56). Mengabdikan kepada Allah SWT mengandung arti luas, yakni seluruh aktivitas hidup di dunia ini untuk Allah semata (QS. al-An'am/6: 162), untuk mencapai rida Allah (QS. al-Fajr/89: 28) karena setelah hidup ini manusia semua akan kembali kepada Allah SWT. di akhirat.

Tujuan umum inilah yang menjiwai tujuan pendidikan Islam. Karena itu, dalam Islam tujuan pendidikan secara umum adalah dalam rangka pembentukan kepribadian muslim (*al-syakhshiyah al-Islāmiyah*), meliputi pemikiran dan kejiwaan atau sikap, yakni pribadi yang ideal meliputi aspek individu, sosial, dan intelektual.³ Dengan redaksi yang lain, pendidikan Islam berorientasi pada pengembangan kepribadian dalam hubungan kepada Allah SWT., dalam menjalani kehidupan sosial, dan alam sekitar untuk kepentingan hidup manusia.⁴

Secara konstitusi, sebenarnya tujuan pendidikan di Indonesia telah mencakup tujuan pendidikan Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama. Hal ini terlihat dalam rumusan tujuan pendidikan nasional:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

²PMA No. 90 Tahun 2013 Pasal 2-6.

³Rumusan tujuan pendidikan dalam Islam seperti ini dapat dilihat seperti dalam Abd. Rahman Getteng, *Pendidikan Islam dalam Pembangunan Moral, Remaja, Wanita, dan Pembangunan*, (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1997), h. 35. Mengenai tujuan pendidikan Islam terdapat berbagai rumusan. Misalnya ada yang merumuskan bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk mewujudkan manusia yang bertakwa, memiliki kekhayusan dan rasa malu. Lihat Muhammad Qutb, *Sistem Pendidikan Islam*, terjemahan Salma Harun, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), Cet. ke-1, h. 398. Yang lain merumuskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terciptanya kepribadian muslim dengan indikator: jasmaninya sehat, kuat, dan berketerampilan; akalannya cerdas, yakni mampu menyelesaikan masalahnya secara cepat, tepat, ilmiah, filosofis, memiliki serta mengembangkan sains; dan hatinya bertakwa kepada Allah SWT., yakni selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta hatinya mampu berhubungan dengan alam gaib. Lihat Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), Cet. ke-1, h. 50-51.

⁴H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi aksara, 1996), Cet. ke-4, h. 113.

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁵

Dari rumusan ini, yang menjadi titik tekan pendidikan Islam adalah takwa dan akhlak mulia. Takwa sebagaimana lazim dipahami adalah melaksanakan seluruh yang diperintahkan Allah SWT. dan meninggalkan seluruh yang dilarang-Nya. Dengan rumusan ini, sebenarnya tujuan pendidikan itu ingin membentuk manusia yang mengamalkan seluruh ajaran Islam, karena takwa hanya dapat terbentuk jika seluruh ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan dilaksanakan, baik dalam tataran individu, masyarakat maupun pemerintahan.

Namun, yang perlu dikritisi adalah apakah takwa dan berakhlak mulia hanya bisa diwujudkan jika madrasah hanya berciri khas Islam,⁶ sebagaimana tujuan diselenggarakannya madrasah? Inilah yang perlu dikaji dalam tulisan ini.

B. Sejarah Madrasah

Madrasah sebagai lembaga pendidikan dalam bentuk formal telah dikenal sejak abad ke-11 atau ke-12 M (abad ke-5-6 H), yaitu sejak dikenal adanya Madrasah Nizamiyah yang didirikan di Bagdad oleh Nizâm al-Mulk, seorang wazir dari Dinasti Saljuk.⁷

Akar munculnya madrasah sebagai lembaga formal dalam pendidikan Islam berasal dari masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan tempat pendidikan. Pada mulanya dalam masjid hanya terdapat satu halaqah pengajaran ilmu pengetahuan. Pada perkembangan selanjutnya halaqah bertambah sehingga masjid tidak memungkinkan lagi dijadikan sebagai tempat aktivitas halaqah tersebut. Muncullah gagasan untuk membuat bangunan di samping masjid yang masih menyatu dengan bangunan masjid yang disebut masjid khan. Selanjutnya muncullah madrasah yang berdiri sendiri, terpisah dari masjid. Namun pada perkembangan selanjutnya masjid ternyata diperlukan oleh madrasah, dibangunlah masjid dalam lingkungan madrasah.⁸

⁵UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3.

⁶PMA Nomor 90 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 2.

⁷Abdul Rachman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. ke-1, h. 11

⁸Ainurrafiq Dawam & Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2004), Cet. ke-1, h. 31

Dari sejarah munculnya madrasah, terlihat adanya perbedaan antara madrasah yang berkembang di zaman Islam (zaman kekhilafahan) dengan madrasah di Indonesia. Madrasah di zaman kekhilafahan lebih mirip dengan apa yang dinamakan pesantren di Indonesia saat ini. Madrasah di zaman kekhilafahan muncul sebagai suatu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan agama tingkat lanjut. Sedangkan di Indonesia, madrasah merupakan lembaga pendidikan umum berciri khas Islam tingkat dasar dan menengah.

Lebih jauh, dalam madrasah di zaman kekhilafahan juga dikaji ilmu yang spesifik untuk setiap cabang ilmu pengetahuan, seperti sekolah teknik yang ada di Damaskus (Suriah). Bahkan pada perkembangannya, madrasah ini menjadi semacam *al-jami'ah* yang sekarang disebut universitas, seperti Universitas Cordova yang dibangun oleh Al-Hakam bin Abdurrahman al-Nashir di Andalusia (kini Spanyol) yang menjadi universitas paling masyhur ketika itu yang menjadi pusat keilmuan di Eropa.⁹ Ada juga Universitas Mustanshiriyah di Bagdad (Iraq).¹⁰ Selain itu, ada juga Darul Hikmah yang didirikan oleh khalifah Harun al-Rasyid di Bagdad, Darul Hikmah di Kairo (Mesir) yang dibangun oleh Khalifah al-Hakim bi Amrillah tahun 395 H., al-Azhar di Kairo yang dibangun oleh Dinasti Fatimiyah tahun 360 H., sejak tahun 378 H. Jauhar al-Saqilli menjadikannya sebagai universitas.¹¹

Munculnya madrasah di Indonesia dapat dilihat dari dua situasi yang melatarbelakanginya, yakni *pertama*, adanya gerakan pembaruan di dunia Islam yang masuk juga ke Indonesia. Pembaruan itu juga terjadi dalam sistem pendidikan Islam. *Kedua*, sebagai respon pendidikan Islam dari adanya kebijakan pendidikan penjajah Belanda yang memasukkan sistem sekolah sekuler dan mengabaikan pendidikan agama.¹²

Para ahli sejarah pendidikan di Indonesia menganggap bahwa madrasah pertama yang ditemukan di Indonesia adalah Madrasah Diniyah Labai al-Yunusiah di Sumatera Barat dan Madrasah Mamba'ul Ulum di Jawa yang didirikan pada kurun awal abad ke-

⁹Raghib al-Sirjani, *Qisshat al-Andalus, Min al-Tafh ila al-Suquth*, diterjemahkan oleh Muhammad Ihsan dan Abdul Rasyad Shiddiq dengan judul *Bangkit dan Runtuhnya Andalusia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Cet. ke-1, h. 363.

¹⁰Muhammad Husain Abdullah, *Dirasaat fi al-Fikr al-Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Zamroni dengan judul *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, h. 194-195.

¹¹Ahmad Syalaby, *Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Muchtar Jahja dan Sanusi Latief dengan judul *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), h. 95.

¹²Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. ke-2, h. 82

20 M. Keduanya sudah terorganisasi dengan baik dan permanen. Madrasah tersebut masih kuat mengajarkan ilmu-ilmu agama, tapi juga mengajarkan ilmu-ilmu umum.¹³

Madrasah Adabiyah berbeda dengan Diniyah Labai. Madrasah Adabiyah lebih bersifat sekolah Belanda yang ditambahkan pendidikan agama di dalamnya. Sedangkan Madrasah Diniyah merupakan pendidikan yang banyak terpengaruh dengan Timur Tengah.¹⁴

Mahmud Yunus menyebutkan bahwa sejumlah madrasah yang berdiri di awal pertumbuhannya adalah Adabiyah School didirikan oleh Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Minangkabau; Diniyah School Labai al-Yunusiah (1915) di Sumatera Barat; Madrasah Nahdhatul Ulama di Jawa Timur; Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta; Madrasah Tasywiq Thulub di Jawa Tengah; Madrasah Persatuan Umat Islam di Jawa Barat; Madrasah Jam'iyat Kheir di Jakarta; Madrasah Amiriyah di Sulawesi Selatan; dan Madrasah Assulthoniyah di Kalimantan.¹⁵

Lembaga pendidikan madrasah ini semuanya murni upaya masyarakat khususnya untuk mengajarkan Islam kepada murid-muridnya, sehingga madrasah ini sangat identik dengan sekolah agama. Karena itu, hampir semua madrasah yang berdiri dapat ditemukan adanya ulama di dalamnya sebagai pendiri dan sebagai guru utamanya. Begitu juga pada perkembangan selanjutnya, ulama sangat berperan dalam berkembangnya madrasah.

Ulama yang dikenal berjasa mengembangkan madrasah di Indonesia adalah antara lain: Syaikh Amrullah Ahmad di Padang, KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, dan KH. Wahab Hasbullah.¹⁶ Suatu hal yang unik adalah, bahwa para ulama yang mengembangkan madrasah ternyata juga sebagai pejuang. Mereka juga mendirikan organisasi sebagai sarana perjuangan. Begitu juga mereka mendirikan lembaga pendidikan sebagai alat untuk menghimpun generasi dalam rangka tujuan perjuangan.

Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan, bahwa tujuan pendirian madrasah, juga pendidikan Islam lainnya di masa penjajahan adalah di samping untuk tujuan

¹³*Ibid.*, h. 98.

¹⁴*Ibid.*, h. 103

¹⁵Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, dalam Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, h. 98

¹⁶Abdul Rachman Saleh, *Madrasah ...*, h. 19

pengembangan keilmuan dan menanamkan keislaman, juga untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan dan bela negara.¹⁷

Di sini terlihat bahwa motivasi pendirian madrasah mempunyai kesamaan dengan motivasi pendirian pesantren meskipun dalam bentuk yang berbeda. Ini juga menandakan bahwa madrasah sebenarnya masih kuat berakar dari pesantren.

Setelah kemerdekaan, madrasah mengalami perkembangan pesat di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dekade tahun 1960-an madrasah sudah tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Madrasah Ibtidaiyah saat itu berjumlah 13.057, MTs 776, dan MA 16 buah.¹⁸ Sehingga secara keseluruhan Madrasah di Indonesia pada dekade itu berjumlah 13849 buah.

C. Sistem Pendidikan Madrasah

Pada tahun 1975 lahir Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama). Dalam SKB tersebut dinyatakan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran dasar sekurang-kurangnya 30% dari mata pelajaran umum. Dalam SKB tersebut juga disebutkan tiga hal penting: 1) ijazah madrasah dapat memiliki nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum setingkat, 2) lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum setingkat lebih di atas, dan 3) siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum setingkat.¹⁹

Kemajuan dalam dunia madrasah terjadi pada tahun 1984 dengan dikeluarkannya SKB Dua Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama) Nomor 229/U/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. Sebagai *follow up* dari SKB dua menteri tersebut, maka lahirlah Keputusan Menteri Agama masing-masing Nomor 99 Tahun 1984 (kurikulum MI), Nomor 100 Tahun 1984 (kurikulum MTs), dan Nomor 101 Tahun 1984 (kurikulum MA). Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa program kurikulum madrasah terdiri dari program kurikuler, ko kurikuler, dan ekstra kurikuler, baik program inti maupun program pilihan.

¹⁷Rochidin Wahab, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2004), Cet. ke-1, h. 20

¹⁸Maksum, *Madrasah ...*, h. 126

¹⁹Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), Cet. ke-3, h. 182

Setelah terbitnya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, madrasah dianggap sebagai sekolah umum berciri khas Islam. Sebagai tindak lanjut dari UU ini, lahirlah Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 1994 Tentang Kurikulum MI, Nomor 372 Tahun 1994 Tentang Kurikulum MTs, Nomor 373 Tahun 1994 Tentang Kurikulum MA.

Babak baru bagi madrasah terlihat dengan lahirnya UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional.²⁰ Dalam UU tersebut lembaga pendidikan terdiri dari lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal. Lembaga pendidikan formal terdiri dari: pendidikan dasar: SD, MI, dan sederajat, SMP, MTs, dan sederajat (pasal 17 ayat 2), pendidikan menengah: SMA, MA, SMK, MAK, dan bentuk lain yang sederajat (pasal 18 ayat 3); dan pendidikan tinggi: akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas (pasal 20).²¹

Sampai saat ini ada dua jenis madrasah yang dikenal di tanah air, yakni Madrasah dan Madrasah Diniyah Islamiyah (MDI).²² Madrasah terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) lama belajar 6 tahun, madrasah tsanawiyah, (MTs) lama belajar 3 tahun, dan Madrasah Aliyah (MA) lama belajar 3 tahun. Madrasah Aliyah sendiri terdiri dari dua macam, yakni Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Sedangkan Madrasah Diniyah Islamiyah terdiri dari Madrasah Diniyah Awwaliyah, Madrasah Diniyah Wustha, dan Madrasah Diniyah Ulya, masing-masing lama belajarnya selama dua tahun.

Anak yang diterima belajar di Madrasah Diniyah Awwaliyah adalah mereka yang sudah duduk di bangku kelas 2 SD. Pada Madrasah Wustha mereka yang telah memiliki sertifikat Madrasah Diniyah Awwaliyah atau telah duduk di bangku kelas 1 SMP. Sedangkan di Madrasah Diniyah Ulya mereka yang telah memiliki sertifikat Madrasah Diniyah Wustha atau telah duduk di bangku kelas 1 SMA.

²⁰Yang dimaksud pendidikan Islam dalam UU Nomor 20 tahun 2003, yakni: 1) pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan, 2) pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, dan 3) pendidikan sebagai nilai-nilai Islami. Lihat Haedar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. ke-1, h. 16.

²¹Selengkapnya Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 17, 18, 20, 26, dan 27.

²²Madrasah Diniyah sebenarnya merupakan lembaga pendidikan agama Islam secara klasikal yang berfungsi untuk memenuhi hasrat umat Islam yang menginginkan anak-anak mereka di samping bersekolah juga mendapatkan pendidikan agama dengan baik. Rochidin Wahab, *Sejarah ...*, h. 207-208. Madrasah Diniyah merupakan kelompok pendidikan keagamaan. Lihat UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 ayat 4.

D. Orientasi Pendidikan Madrasah

Mengamati perkembangan madrasah dan pesantren sejak awal berdirinya sampai saat ini, dapat dimengerti bahwa keduanya lahir sebagai respon umat Islam terhadap kebutuhannya terhadap pendidikan Islam. Madrasah lahir di samping untuk merespon tuntutan dari umat Islam sendiri akan lembaga pendidikan yang modern, juga sekaligus sebagai respon terhadap pendidikan sekuler yang ditawarkan oleh penjajah Belanda yang mendiskriminasikan agama dan pendidikan agama. Selain itu, madrasah juga lahir sebagai upaya menjembatani antara pendidikan pesantren yang bersikukuh mempertahankan ciri pendidikan Islam tradisional dan sekolah-sekolah modern yang juga didirikan oleh sebagian umat Islam sendiri.

Niat pendirian madrasah adalah sebagai upaya memadukan sistem sekolah modern dengan sistem pesantren. Untuk mewujudkan hal itu, maka kurikulum pesantren dan sekolah modern digabung menjadi satu dalam kurikulum madrasah. Akan tetapi, yang terjadi kemudian adalah madrasah menjadi sekolah yang hanya bercirikan Islam. Hal itu terjadi karena pada saat mengambil kurikulum pesantren, ruhnya²³ tidak diikuti. Pada perkembangan selanjutnya yang terjadilah banyak masalah yang dihadapi madrasah dan banyak madrasah yang dihadang oleh banyak masalah.

Ada orang yang berpandangan bahwa masalah yang dihadapi oleh madrasah di negeri ini, yakni:

1. Bahwa selama ini madrasah telah kehilangan orientasi dan akar sejarahnya, di mana madrasah sebenarnya berakar dari pesantren, meskipun bukan kelanjutan dari pesantren. Sebagai lembaga yang berakar dari pesantren seharusnya madrasah tidak meninggalkan jiwa pesantrennya. Pola pendidikan yang menjiwai pesantren mesti terus dihidupkan dalam madrasah, seperti adanya hubungan emosional yang terbangun antara guru dengan siswa, kepatuhan kepada guru, disiplin, serta interaksi antara semua elemen madrasah dengan pendekatan religisitas.²⁴

²³Yang penulis maksudkan sebagai ruh pesantren adalah pola umum pendidikan pesantren seperti diuraikan pada bagian terdahulu.

²⁴Peran tradisional yang dimainnkan pesantren meliputi adanya hubungan yang akrab antara santri dan kyai, tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri kepada kiai, pola hidup sederhana, kemandirian atau independensi, berkembangnya iklim dan tradisi tolong menolong dan suasana persaudaraan, disiplin yang ketat, berani menderita untuk mencapai tujuan, dan kehidupan dengan tingkat religiusitas yang tinggi. Lihat Mukti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, dalam Amin Haedari, dkk., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, (Jakarta: IRD Press, 2004), Cet. ke-1, h. 15.

2. Adanya dualisme pemahaman terhadap madrasah. Di satu sisi madrasah diidentikkan dengan sekolah karena memiliki muatan kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum, dan di sisi lain madrasah dianggap sebagai pesantren dengan sistem klasikal kemudian disebut madrasah diniyah.²⁵
3. Masalah lain, masalah klasik yang menimpa madrasah dalam hal diskriminasi manajerial dan pendanaan. Madrasah (yang dibina oleh kementerian agama) masih dianggap sebagai sekolah kelas dua dari sekolah-sekolah (yang dibina Kementerian Pendidikan).

Tiga hal yang dikemukakan di atas tentu memang merupakan masalah yang dihadapi oleh madrasah sampai saat ini, khususnya dalam kaitannya dengan kelembagaan dan kurikulum pendidikan. Namun demikian, di balik masalah-masalah yang dihadapi lembaga pendidikan Islam tersebut, ada masalah yang mendasar yang jika masalah ini tidak terpecahkan, maka sampai kapanpun madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam tidak akan pernah mencapai tujuannya. Masalah pendasar tersebut adalah terjadinya disorientasi yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan madrasah.

Disorientasi yang dimaksud adalah bergesernya visi yang dituju oleh madrasah. Bisa jadi rumusan visi atau tujuan tidak bergeser dari semula, tetapi implementasi dan hasil yang didapatkan mengalami pergeseran. Hal ini disebabkan oleh penafsiran atau penangkapan atas makna rumusan visi dan tujuan pendidikan yang sudah bergeser. Perubahan pemaknaan ini telah menyebabkan masalah yang banyak dalam dunia pendidikan termasuk madrasah. Hal ini disebabkan oleh hal:

1. Pergeseran Paradigma

Paradigma adalah kerangka berpikir²⁶ atau cara pandang berdasarkan kaidah berpikir tertentu. Paradigma ibarat kaca mata yang digunakan oleh seseorang untuk memandang suatu objek. Objek yang sama jika dipandang dengan kaca mata berbeda akan berbeda pula yang ditangkap oleh yang memandangnya. Paradigma erat kaitannya bahkan ia selalu berdasarkan ideologi seseorang. Bagi umat Islam, paradigmanya harus berdasarkan akidah Islam.

Secara paradigmatik, pendidikan madrasah harus berasaskan Islam. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam harus menjadikan akidah Islam sebagai asas dalam penentuan tujuan pendidikan, perumusan kurikulum dan standar nilai ilmu pengetahuan

²⁵Ainurrafiq Dawam & Ahmad Ta'arifin, *Manajemen ...*, h. 23-24

²⁶<http://kbbi.co.id/cari?kata=paradigma>

dan proses belajar mengajar, termasuk penentuan kualifikasi guru serta budaya sekolah yang akan dikembangkan di madrasah.²⁷

Madrasah dewasa ini memang secara rumusan tujuan tidak terdapat masalah yang berarti. Iman dan takwa tetap menjadi tujuan yang normatif, termasuk semua lembaga pendidikan di negeri ini. Akan tetapi, disadari atau tidak, iman dan takwa yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan itu telah diwarnai bahkan dimaknai dengan paradigma parsial bukan holistik sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Dengan kata lain, paradigma pendidikan madrasah mengarah pada paradigma pendidikan yang sekularistik.

Sekuler merupakan istilah yang menggambarkan makna yang bersifat duniawi atau kebendaan (bukan bersifat keagamaan atau kerohanian).²⁸ Sekularisasi merupakan istilah yang menggambarkan suatu proses perubahan masyarakat dari identifikasi dekat dengan nilai-nilai dan institusi agama menjadi nilai-nilai dan institusi non-agama dan sekuler. Sekularisasi mengarah pada keyakinan bahwa ketika masyarakat berkembang, terutama melalui modernisasi dan rasionalisasi, agama kehilangan kekuasaannya di semua aspek kehidupan sosial dan pemerintahan.²⁹

Sekularisasi tidak meninggalkan agama. Sekularisasi hanya memisahkan agama sebagai penentu dalam kehidupan. Sekularisasi meniscayakan pemisahan antara agama dengan bukan dunia. Agama terkait masalah keimanan, ibadah dan moral. Sedangkan selainnya dianggap sebagai masalah dunia yang terlepas dari masalah agama sehingga tidak perlu diatur oleh agama selain hanya persoalan nilai-nilai agama yang dibawa pada ranah dunia tersebut.

Jadi, sekularisasi pada dunia pendidikan bukan bermaksud mengenyampingkan agama, tetapi menggunakan agama hanya sebagai ketentuan spiritual dan moral, bukan pada aspek agama sebagai aturan hidup. Ajaran-ajaran agama diajarkan sebatas sebagai sistem nilai (*value*), bukan sebagai sistem hidup yang formal. Padahal nilai itu justru hanya akan terwujud jika aturannya dilaksanakan. Bagaimana mungkin dikatakan akan menghasilkan nilai sesuatu kalau sesuatu itu tidak dilaksanakan. Sama halnya,

²⁷Muh. Ismail Yusanto, dkk., *Menggagas Pendidikan Islami*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2014), Cet. Ke-4, h. 12.

²⁸kbbi.co.id/arti-kata/sekuler.

²⁹Pippa Norris and Ronald Inglehart, *Sacred and Secular, Religion and Politics Worldwide*, Chapter 1, 2004, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/>

bagaimana mungkin akan menghasilkan nilai akhlak jika akhlaknya sendiri tidak dilaksanakan.

Madrasah dengan paradigma sekularistik dewasa ini telah menghantarkan umat Islam menghadapi masalah besar yang jika tidak segera diatasi akan mengalami nasib sebagaimana yang dihadapi oleh Barat yang sekuler. Memang Barat mencanangkan tujuan pendidikan yang sejatinya baik karena juga bertujuan mendidik generasi yang baik dan sebagai warga negara yang baik. Akan tetapi, baik yang dimaksud terlepas dari basis agama. Masyarakat Barat menghadapi masalah perpecahan dan kekeringan spiritual dan moral yang dahsyat dalam seluruh aspek kehidupannya. Tidak ada yang mampu mengatasi kecuali aturan negara belaka. Namun, ketika aturan negara tidak lagi berpijak pada keadilan, maka akan timbul anarki moral dan kejahatan di mana-mana.³⁰

Madrasah sebagai lembaga formal pendidikan Islam, tentu *mainpurpose*-nya adalah mewujudkan tujuan pendidikan Islam. Jika dicermati tujuan pendidikan Islam dapat dipahami bahwa rumusan-rumusannya sangat istimewa. Keistimewaannya terletak pada adanya upaya merealisasikan tujuan-tujuan mulia yang digariskan oleh Islam. Tujuan-tujuan tersebut tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yakni untuk mengabdikan kepada Allah SWT.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. al-Zariyat/51: 56).

Tujuan itulah yang kemudian dijabarkan dalam rumusan-rumusan tujuan pendidikan yang lebih kongkrit sesuai lembaga pendidikan dan tahapan pendidikan yang harus dilalui. Dalam Islam, tujuan pendidikan secara umum adalah dalam rangka pembentukan kepribadian muslim (*al-syakhshiyah al-Islāmiyah*) yang seutuhnya, meliputi pemikiran dan kejiwaan atau sikap, yakni pribadi yang ideal meliputi aspek individu, sosial, dan intelektual.³¹ Selain itu, pendidikan Islam juga bertujuan membekali siswa dengan seperangkat kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh penghidupan di dunia untuk merealisasikan kerahmatan Islam.

³⁰Syed Sajjad Husain & Syed Ali Asharaf, *Crisis Muslim Education*, alih bahasa Rahmani Astuti, *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1994), Cet. ke-6, h. 55.

³¹Abd. Rahman Getteng, *Pendidikan ...*, h. 35.

Indikator yang dapat dinilai secara lahirnya adalah jasmaninya sehat, kuat, dan berketerampilan; akal nya cerdas, yakni mampu menyelesaikan masalahnya secara cepat, tepat, ilmiah, filosofis, memiliki serta mengembangkan sains; dan hatinya bertakwa kepada Allah SWT., yakni selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta hatinya mampu berhubungan dengan alam gaib.³²

Pribadi yang seutuhnya merupakan sekumpulan ciri-ciri manusia yang baik, dilandasi oleh iman dan takwa, kekhusyuan dan rasa malu.³³ Kualitas pribadi tersebut meskipun dari sisi hereditas telah tercakup dalam fitrah penciptaan manusia (QS. al-Rūm/30: 30), tetapi pengembangannya mutlak melalui pendidikan.

Dengan demikian, kegiatan pendidikan Islam yang terdapat pada semua jalur, jenis, dan jenjangnya³⁴ bertanggung jawab mengusahakan pelaksanaan tugas itu, tidak terkecuali lembaga pendidikan madrasah.

Bila dicermati rumusan-rumusan tujuan pendidikan itu pada dasarnya mengarah pada pembentukan kepribadian Islam. kepribadian Islam mencakup pemikiran, sikap dan perilaku (*fikrah, nafsiyah, dan 'amaliyah*). Maka tugas berat yang diusahakan melalui pendidikan adalah perubahan dari pemikiran rendah ke pemikiran tinggi dan dari sikap serta perilaku yang tercela menuju sikap dan perilaku yang terpuji, yakni pemikiran dan perilaku yang sesuai dengan al-Qur`an dan sunnah Rasulullah SAW.

Selain itu, pendidikan juga mengusahakan agar peserta didik memiliki keterampilan hidup yang dapat digunakan untuk memperoleh *ma'isyah* (penghidupan) di dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Allah swt menegaskan dalam al-Qur`an:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah

³²Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), Cet. ke-1, h. 50-51.

³³Muhammad Qutb, *Sistem Pendidikan Islam*, h. 398.

³⁴Istilah jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang dimaksud istilah jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan (pasal 1 ayat 7). Adapun jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan (pasal 1 ayat 9). Sedangkan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan (pasal 1 ayat 8).

berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. al-Qaṣaṣ/28: 77).

Keterampilan atau keahlian itu dikembangkan dari potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Pencapaian dari salah satu unsur manapun yang menonjol dari potensi peserta didik itu merupakan suatu keahlian untuk menjadi sumber mendapatkan rizki atau karunia Allah SWT.

Jika kepribadian Islam ini telah terbentuk dalam diri setiap alumni madrasah, maka standar Islam yang berpatokan pada halal-haram, perintah dan larangan Allah telah terpola dalam dirinya dalam menekuni aktivitas *ma'isyah*-nya. Sehingga dalam mencari penghidupan selalu bertanya dan mengedepankan mencari rizki yang halal dan dengan cara yang halal.

Itulah orientasi yang seharusnya menjadi misi setiap madrasah dan lembaga pendidikan Islam. Untuk mewujudkan hal ini, tentu tidak cukup dengan mengubah kurikulum, membina guru dan menyediakan anggaran yang cukup. Perubahan pada tataran tersebut, justru akan semakin melebarkan jarak antara harapan dan hasil yang dicapai nantinya. Karena itu, hal mendasar yang perlu segera dibenahi adalah mengubah pondasi pendidikan madrasah yang selama ini berdiri pada asas sekularisme menuju pondasi Islam yang berdiri di atas *mabda`* (ideologi) Islam yang digali dari aqidah Islam.

2. Kelemahan Fungsional Lembaga Pendidikan

Pendidikan berlangsungnya pada tiga tempat atau lembaga pendidikan, di rumah, di sekolah/madrasah, dan di masyarakat. Ketiganya mesti berfungsi sinergis jika ingin menghasilkan output yang baik. Kepribadian Islam yang menjadi tujuan utama pendidikan hanya akan terwujud jika pendidikan di rumah sejalan dengan di madrasah serta sesuai di masyarakat.

Kurang optimalnya peran madrasah dewasa ini tidak bisa dipungkiri karena kurang optimalnya fungsi keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama. Orientasi pendidikan keluarga sudah mengalami pergeseran dari sebagai wadah penanaman benih-benih keimanan dan amal shalih ke sebagai wadah peristirahatan anggota keluarga semata setelah masing-masing telah lelah di luar rumah. Salah satu penyebab utamanya adalah ditinggalkannya tugas utama ibu sebagai *ummum wa rabbat al-bayt*

(ibu pendidikan generasi dan istri pengatur rumah tangga).³⁵ Kaum ibu sudah lebih banyak menghabiskan waktunya, pikiran dan tenaganya untuk berdaya di luar rumah dengan membiarkan dirinya tereksplotasi untuk kepentingan mengejar obsesi dalam lapangan ekonomi dan politik. Akibatnya, pendidikan terabaikan di rumah sehingga pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada madrasah.

Pergeseran fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan tidak bisa juga dilepaskan dari pengaruh kondisi masyarakat yang materialistik-hedonistik. Pemberdayaan masyarakat yang hanya mengedepankan aspek fisik dan untuk menghasilkan karya yang diukur berdasarkan penilaian materi, telah berpengaruh kepada lembaga pendidikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat itu. Jadilah madrasah hanya berlabel Islam, tetapi tidak seluruhnya untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan dalam Islam. Madrasah kemudian menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan pasar yang berorientasi sekularistik. Akibatnya, madrasah jadi lemah dan tidak dapat optimal berfungsi sebagai lembaga model bagi pendidikan Islam.

Kelemahan pada madrasah terjadi pada kacaunya kurikulum, tidak optimalnya peran guru, serta budaya sekolah yang tidak seiring dengan kehendak Islam.³⁶

a. Kurikulum

Kacaunya kurikulum berawal dari ketidakjelasan orientasi pendidikan. Orientasi pendidikan yang sekularistik berpengaruh pada penyusunan kurikulum pendidikan yang sekularistik pula. Kurikulum sekularistik tidak akan memberikan ruang yang semestinya bagi penguasaan *tsaqafah* Islam dan pembentukan kepribadian Islam. Akibatnya pencapaian tujuan kurikulum lebih banyak pada ranah kognitif. Siswa hanya dituntut menguasai pengetahuan keislaman, tetapi tidak dituntut untuk mempraktekkannya. Atau mempraktekkannya, tetapi tidak seutuhnya atau nilai-nilainya saja.

Dewasa ini, kurikulum yang terdapat di madrasah tidak terlalu jauh berbeda dengan kurikulum di sekolah pada umumnya kecuali berciri khas Islam. Ciri khas Islam yang dimaksud adalah adanya pelajaran pendidikan agama Islam lebih banyak dan pakaian yang berciri khas Islam. Pelajaran pendidikan agama yang diberikan di madrasah mencakup: al-Qur`an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan

³⁵Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Nizham al-Ijtima'iy fi al-Islam*, penerjemah M. Nasir, dkk., *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (Jakarta: HTI Press, 2012), Cet. ke-6, h 135.

³⁶Muh. Ismail Yusanto, dkk., *Menggagas ...*, h. 15.

Islam, termasuk bahasa Arab.³⁷ Bahasa Arab tidak dikategorikan sebagai bagian dari pendidikan agama karena dianggap sebagai bahasa asing. Keempat ini mata pelajaran ini diajarkan mulai madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah.

Dalam prakteknya, pemberian mata pelajaran ini lebih banyak pada aspek teori sedikit sekali aspek implementasinya. Sebagai contoh, meskipun terdapat pelajaran al-Qur`an Hadis pada semua jenjang madrasah, tetap saja siswa-siswa madrasah jauh dari al-Qur`an dan hadis. Pelajaran al-Qur`an yang diberikan tidak menargetkan siswa untuk menghafalkannya, selain hanya mengambil sebagian ayat yang sesuai dengan tema-tema yang menjadi tuntutan dalam masyarakat. Akibatnya, siswa menganggap al-Qur`an hanya sebagai bidang studi atau referensi sebagaimana buku-buku lainnya. Jadilah siswa asing dan menyepelekan al-Qur`an sampai mereka meningkat pada pendidikan tinggi pun al-Qur`an tidak menjadi perhatian besarnya. Justru yang menjadi perhatian adalah bagaimana meraih prestasi-prestasi duniawi yang berbentuk materil saja. Begitu juga obsesi anak-anak adalah meniru figur-figur publik yang bergelimang dengan kesenangan, uang, dan kekuasaan.

Jika ditelusuri kurikulum pendidikan Islam sejak masa awal, ditemukan bahwa cakupan isi kurikulum pada semua jenjang pendidikan terdiri dari tiga aspek pokok sesuai tujuan pendidikan yang ditetapkan, yakni: kurikulum yang berisi pembentukan kepribadian Islam (*syakhshiyah Islamiyah*), penguasaan *tsaqafah* Islam, dan penguasaan keterampilan hidup atau keahlian.³⁸

Untuk pembentukan kepribadian Islam siswa sejak tingkat dasar sampai tinggi diberikan materi pembentukan dan peningkatan kepribadian Islam. Di zaman awal-awal Islam, pelajaran pertama yang diberikan kepada siswa adalah hafalan al-Qur`an.³⁹ Bagi madrasah tingkat rendah, tujuan hafalan al-Qur`an diberikan agar membiasakan dan menyadarkan anak-anak bahwa dengan menghafal al-Qur`an tertanam dalam dadanya perbendaharaan takwa. Meskipun anak-anak belum sepenuhnya mengerti apa yang mereka hafal, tetapi hatinya akan bergetar dengan pengaruh susunannya yang indah. Hal ini sangat penting karena meskipun di masa mendatang tidak semua anak dapat

³⁷Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah.

³⁸Muh. Ismail Yusanto, dkk., *Menggagas ...*, h. 93.

³⁹Asma Hasan Fahmi, *Mabadi al-Tarbiyah al-Islamiyah*, alih bahasa Ibrahim Husein, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), Cet. ke-1, h. 70.

melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi, tetapi ia telah memiliki modal rohani yang sangat berharga berupa al-Qur`an yang tersimpan dalam dadanya.⁴⁰

Adapun untuk *tsaqafah* Islam, materi yang diberikan adalah: *aqidah Islamiyah*, pemikiran Islam (untuk tingkat menengah dan tinggi), *sirah Nabawiyah*, *fiqh fardiyah*, ushul fiqh (untuk tingkat menengah dan tinggi), akhlak, bahasa Arab, *'ulum al-Qur`an* dan *'ulum al-Hadis* (untuk tingkat menengah dan tinggi), dan dakwah.⁴¹ Mata pelajaran kategori *tsaqafah* ini diberikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan dengan materi yang disesuaikan dengan tingkat atau jenjang pendidikan.

Adapun materi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh penghidupan diberikan pengetahuan dasar berupa: matematika, pengetahuan alam (fisika, kimia dan biologi), pengetahuan social (sejarah, ekonomi, dan geografi), bahasa (bahasa Inggris, dan lain-lain sesuai minat), dan ilmu terapan lanjutan seperti akuntansi, computer, dan sebagainya. Pengetahuan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, kebutuhan minat peserta didik dan kemajuan teknologi.

b. Fungsi guru

Guru dalam Islam menempati posisi yang sangat penting sebagai sampel perilaku yang diharapkan. Di masa lalu, guru merupakan figur-figur yang menarik bagi siswa untuk berkumpul di sekitar mereka karena guru-guru itu adalah para pribadi unggul yang patut untuk ditiru keilmuan, akhlak dan ketaatannya pada Islam. dalam masyarakat Islam, guru hendaknya orang yang sangat mematuhi Islam, bukan hanya dalam lahiriyahnya, tetapi juga batiniyahnya. Guru juga harus memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan semua siswanya menjadi pribadi yang seperti dirinya atau melampaui dirinya. Tanggung jawab ini harus melekat pada setiap guru apapun bidang studi atau jurusan yang digelutinya dan diajarkannya.

Guru ideal seperti itu tentu sulit didapatkan di madrasah dewasa ini. Guru sekarang seolah-olah hanya petugas-petugas yang digaji oleh negara untuk menyampaikan materi-materi pelajaran di sekolah, tidak jauh dari situ. Syarat-syarat untuk menjadi guru juga lebih banyak memperhatikan aspek luar berupa pengetahuan dan keahlian saja. Sehingga boleh jadi guru itu menguasai pengetahuan dan keterampilan yang memang dibutuhkan siswa, tetapi dia berakhlak buruk, peminum

⁴⁰Asma Hasan Fahmi, *Mabadi ...*, h. 71.

⁴¹Muh. Ismail Yusanto, dkk., *Menggagas ...*, h. 96.

minuman keras, pelaku zina atau penjudi. Akibatnya terjadi jurang yang jauh antara guru dan siswanya.

Dahulu di zaman awal-awal Islam, tidak didapati adanya guru yang mogok mengajar atau menuntut kenaikan upah atau gaji. Juga tidak didapati adanya guru yang memungut uang dari siswanya untuk keperluan pribadinya. Akan tetapi dewasa ini, hal-hal semacam itu telah menjadi pemandangan lumrah dalam dunia pendidikan. Yang terjadi kemudian terjadinya gap antara perilaku guru dengan tugas guru sebagai pendidik. Korbannya adalah siswa berhadapan pada dua pilihan: siswa bisa jadi mengikuti kebiasaan buruk gurunya atau jika siswa mendapatkan pendidikan di rumah yang baik, ia akan memandang rendah gurunya.⁴² Hilanglah fungsi guru sebagai pendidik generasi yang bertugas membentuk kepribadian Islam.

c. Budaya sekolah

Budaya sekolah bukanlah suatu yang terpisah dengan lingkungan lain. Budaya sekolah muncul akibat interaksi antara individu dalam masyarakat. Interaksi itu akan menghasilkan pengaruh mempengaruhi, yang bisa jadi baik bisa jadi buruk.

Buruknya pendidikan di rumah akan berpengaruh dan memberikan beban berat pada pendidikan di sekolah. Madrasah akan menghadapi persoalan yang ruwet jika pendidikan di rumah tidak mendukung. Anak yang lahir dari keluarga yang tidak membiasakan anaknya taat beragama, atau keluarga yang menjadi materi sebagai orientasi hidupnya akan menyulitkan madrasah untuk membentuk kepribadian Islam pada diri siswa-siswanya.

Begitu juga di masyarakat, budaya liberal yang tidak mengindahkan aturan agama, media massa yang kerap menyajikan pornografi, kekerasan dan kriminal, maraknya peredaran minuman keras, narkoba, pergaulan bebas dan perzinahan, pemimpin yang korup, serta hukum yang tidak adil akan berdampak buruk pada pelaksanaan pendidikan di madrasah.

Budaya liberal (serba bebas) dan permisif (serba boleh) yang berkembang dalam lingkungan rumah dan masyarakat dewasa ini telah berdampak langsung kepada buruknya budaya sekolah, karena anak-anak dan guru merupakan anggota keluarga dan anggota masyarakat juga.

⁴²Syed Sajjad Husain & Syed Ali Asharaf, *Menyongsong ...*, h. 155.

Budaya buruk itu semakin derasnya saluran seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mengglobal. Pesatnya perkembangan teknologi dengan penemuan alat-alat canggih dalam mengerjakan berbagai pekerjaan telah turut mempengaruhi budaya saling tolong menolong dan peduli di kalangan manusia. Bahkan tidak jarang kemajuan teknologi dapat membunuh nilai-nilai moral dalam masyarakat.⁴³

Budaya bebas dan permisif tercermin di marasah dalam bentuk tata tertib yang dikeluarkan. Kebanyakan madrasah tidak mengindahkan prinsip pemisahan anak laki-laki dan perempuan dalam proses pendidikan. Begitu juga kebanyakan madrasah tidak ketat memberlakukan aturan berpakaian khususnya kepada wanita yang wajib menutup aurat dan mengenakan jilbab. Justru aturan ketat diberlakukan hanya untuk keseragaman warna dan bentuk pakaian saja.

Budaya sekolah akan menjadi baik jika didukung oleh keluarga yang mengerti arti penting pendidikan agama, masyarakat yang berpegang pada ajaran-ajaran agama, serta tata tertib madrasah yang ketat membiasakan suasana religius, bertutur, berpakaian dan berinteraksi dengan berpedoman pada Islam.

Selain itu, budaya sekolah juga akan tumbuh dari adanya dukungan sarana dan prasarana fisik di lingkungan madrasah. Tidak adanya dukungan fasilitas seperti keberadaan masjid, sanitasi, kantin, peralatan kesehatan dan keterpisahan tempat antara laki-laki dan perempuan untuk aktivitas tertentu sangat berpengaruh pada lahirnya budaya sekolah tertentu.

E. Penutup

Madrasah dalam bentuk formal telah dikenal di dunia Islam sejak abad ke-11 atau ke-12 M (abad 5-6 H), dari masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Dari sejarah munculnya, terlihat adanya perbedaan antara madrasah yang berkembang di Timur Tengah dengan di Indonesia. Madrasah yang memberikan pendidikan agama tingkat lanjut di Timur Tengah lebih mirip dengan pesantren di Indonesia. Sedangkan di Indonesia, madrasah merupakan lembaga pendidikan umum berciri khas Islam tingkat dasar dan menengah.

⁴³Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet. ke-1, h. 309.

Munculnya madrasah di Indonesia muncul sebagai reaksi adanya gerakan pembaruan di dunia pendidikan dan sebagai respon pendidikan Islam dari adanya kebijakan pendidikan penjajah Belanda yang memasukkan sistem sekolah sekuler dan mengabaikan pendidikan agama. Karena itu, madrasah banyak mendapat sambutan di tengah umat Islam.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, madrasah yang banyak mengalami pergeseran orientasi. Hal ini disebabkan oleh dua hal, *pertama*, pergeseran paradigma ke arah sekularistik (memisahkan aspek-aspek agama yang bersifat individual dengan sosial dan politik). Implementasi pendidikan telah diwarnai bahkan dimaknai dengan paradigma parsial bukan holistik sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Padahal, secara paradigmatis, pendidikan madrasah harus menjadikan akidah Islam sebagai asas dalam penentuan tujuan pendidikan, perumusan kurikulum dan standar nilai ilmu pengetahuan dan proses belajar mengajar, termasuk penentuan kualifikasi guru serta budaya sekolah yang akan dikembangkan di madrasah. *Kedua*, kelemahan fungsional kelembagaan sebagai dampak kurang optimalnya fungsi keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama dan adanya pengaruh kondisi dan tuntutan masyarakat yang materialistik-hedonistik. Kelemahan madrasah terlihat pada kacaunya kurikulum, tidak optimalnya peran guru, serta budaya sekolah yang tidak seiring dengan kehendak Islam.

F. Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Getteng, *Pendidikan Islam dalam Pembangunan Moral, Remaja, Wanita, dan Pembangunan*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1997
- Abdul Rachman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, Cet. ke-1
- Ahmad Syalaby, *Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Mughtar Jahja dan Sanusi Latief dengan judul *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992, Cet. ke-1
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992, Cet. ke-1
- Ainurrafiq Dawam & Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Jakarta: Lista Fariska Putra, 2004, Cet. ke-1
- Asma Hasan Fahmi, *Mabadi al-Tarbiyah al-Islamiyah*, alih bahasa Ibrahim Husein, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, Cet. ke-1

- H. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Intradisipliner*, Jakarta: Bumi aksara, 1996, Cet. ke-4
- Haedar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Kencana, 2004), Cet. ke-1
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999, Cet. ke-3
- <http://kbbi.co.id/cari?kata=paradigma>
- Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet. ke-1
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah.
- Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam, dalam Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*
- Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, Cet. ke-2
- Muh. Ismail Yusanto, dkk., *Menggagas Pendidikan Islami*, Bogor: Al-Azhar Press, 2014, Cet. ke-4, h. 12.
- Muhammad Husain Abdullah, *Dirasaat fi al-Fikr al-Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Zamroni dengan judul *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*
- Muhammad Qutb, *Sistem Pendidikan Islam*, terjemahan Salma Harun, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), Cet. ke-1
- Mukti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, dalam Amin Haedari, dkk., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, Jakarta: IRD Press, 2004, Cet. ke-1
- Pippa Norris and Ronald Inglehart, *Sacred and Secular, Religion and Politics Worldwide*, Chapter 1, 2004, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/>
- Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013
- Raghib al-Sirjani, *Qisshat al-Andalus, Min al-Tafh ila al-Suquth*, diterjemahkan oleh Muhammad Ihsan dan Abdul Rasyad Shiddiq dengan judul *Bangkit dan Runtuhnya Andalusia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, Cet. ke-1
- Rochidin Wahab, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2004, Cet. ke-1
- Syed Sajjad Husain & Syed Ali Asharaf, *Crisis Muslim Education*, alih bahasa Rahmani Astuti, *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1994, Cet. ke-6
- Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Nizham al-Ijtima'iy fi al-Islam*, penerjemah M. Nasir, dkk., *Sistem Pergaulan dalam Islam*, Jakarta: HTI Press, 2012, Cet. ke-6
- Tim Redaksi Bumi Aksara, *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Aturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, Cet. ke-4
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional